

Peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Safitri¹ Dedi Kusuma Habiebie²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: safitri0521@student.unri.ac.id¹ dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Rehabilitasi narkoba merupakan suatu proses pengobatan dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan juga sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi pencandu narkotika agar para pencandu dapat sembuh dari kecanduan terhadap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai dalam rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba dan mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori peran organisasi dari aromatic D dan juga Sudrajat AR yang memiliki 4 indikator pendekatan yaitu pembagian kerja, departementasi, distribusi otoritas, dan koordinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sudah cukup baik namun dalam aspek koordinasi bidang pencegahan masih kurang maksimal. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya fasilitas rehabilitasi dan juga jarak tempuh yang jauh. Dengan demikian maka Badan Narkotika Nasional Kota Dumai diharapkan lebih menekankan koordinasi dan juga peningkatan fasilitas rehabilitasi.

Kata Kunci: Peran, Rehabilitasi, Narkoba

Abstract

Drug rehabilitation is a treatment process for narcotics abuse to restore or develop the physical, mental and social abilities of the sufferer concerned. Apart from recovering, rehabilitation is also a treatment or care for narcotics addicts so that people with an addiction can recover from their addiction to narcotics. This research aims to find out the role of the Dumai City National Narcotics Agency in the rehabilitation of drug abusers and to find out the inhibiting factors faced in rehabilitating drug abuse victims at the Dumai City National Narcotics Agency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. This research refers to the organizational role theory of aromatic D and Sudrajat AR, which has four approach indicators: division of work, departmentation, distribution of authority, and coordination. The results of this research show that the role played by the organization in achieving the organization's goals is quite good. However, coordination in the field of prevention is still not optimal. The inhibiting factors are the lack of rehabilitation facilities and the long travel distance. In this way, it is hoped that the Dumai City National Narcotics Agency will emphasise coordination more and improve rehabilitation facilities.

Keywords: Role, Rehabilitation, Drugs



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pekanbaru Narkotika menjadi masalah klasik yang sudah sangat banyak terjadi dalam masyarakat, namun dalam penegakan hukumnya masih menjadi kendala utama bagi aparaturnya penegak hukum dalam rangka menjaga stabilitas dan perkembangan nasional bangsa. Pemerintah Indonesia sendiri telah membentuk sebuah lembaga badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkotika yang disebut dengan Badan

Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang bertanggungjawab terhadap permasalahan dan kasus narkoba yang banyak terjadi di Indonesia, lembaga ini ada dan dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai terletak di jalan Air Bersih No.53 kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur. Tugas pokok Badan Narkotika Nasional kota Dumai adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahguna narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam penanggulangan narkoba, karena dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat memutuskan pasokan tali dan permintaan penggunaan narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba yang proses rehabilitasinya tidak berhasil akan berpotensi untuk meningkatkan permintaan narkoba, sementara sesuai dengan amanat undang-undang tidak semua pengguna atau pecandu dijatuhi hukuman penjara. Untuk itu, proses rehabilitasi pengguna atau pecandu narkoba harus dilaksanakan secara tuntas sehingga tidak ada permintaan yang muncul kembali dari mantan pecandu atau pengguna narkoba. Setiap bentuk penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkotika yang memenuhi syarat rehabilitasi maka akan mendapatkan program rehabilitasi. Dimana syarat seseorang dapat melakukan proses rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Saat tertangkap tangan menemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Tangkap Tangan Barang Bukti Pemakaian

No	Jenis	Berat
1	Kelompok Methaphitamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2.4 gram - 8 butir
3	Kelompok Heroin	1.8 gram
4	Kelompok Kokain	1.8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0.5 gram
13	Kelompok Morfin	1.8 gram
14	Kelompok Petidin	0.96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 gram

Sumber: Surat Edaran Mahkamah Agung

2. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
3. Terbukti oleh penyidik POLRI atau penyidik BNN dalam kondisi tangkap tangan.

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa yang ditujukan oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selain dari bentuk rehabilitasi yang dilakukan BNN kota Dumai juga melakukan penyuluhan mengenai rehabilitasi, bentuk dari penyuluhan tersebut adalah:

1. *Skrining Intervensi Lapangan (SIL)* adalah kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka melakukan kontak dengan individu atau kelompok dari sasaran atau populasi tertentu yang tidak efektif bila dijangkau atau dikontak layanan kesehatan yang bersifat pasif.
2. *Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)* yakni suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Dimana intervensi ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga keerbatasan akses terhadap rehabilitasi karena faktor geografis, stigma maupun biaya dapat diminimalisir.

Alasan lain mengapa pecandu harus menjalani rehabilitasi adalah agar para pecandu tersebut bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan narkoba juga sebagai awal baru dalam hidup mereka. Ketika seseorang ingin melepaskan diri dari kecanduan perlu melalui beberapa tahap, salah satunya tersebut adalah proses *detoksifikasi*. Dalam proses ini, seorang pecandu akan dibiasakan untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi dosis narkoba yang biasanya sering digunakan sampai tidak diberikan sama sekali. Pada tahap ini akan sangat berbahaya dan menyakitkan bagi pecandu, oleh sebab itu tentu akan lebih baik apabila didampingi oleh tenaga medis profesional. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkoba. Oleh karena itu, rehabilitasi akan membantu seorang pecandu dalam manajemen emosinya karena biasanya akan disupervisi oleh seorang psikolog atau konselor dalam proses penyembuhannya. Kestabilan emosi juga akan membantu mencegah proses rehabilitasi selesai.

Setiap data pasien atau korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilindungi oleh negara dimana pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, terutama pada bab IV pasal 8-11. Dimana diketahui bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Dalam Peraturan tersebut tertuang bahwa informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BNN Kota Dumai dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Dumai dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Dumai. Maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba". Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai dalam rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Dumai? Faktor Pengambat yang dihadapi BNN Kota Dumai dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba?

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Kebijakan Peran menurut Suhardono dalam Pantoni (2007) yakni dalam penjelasan sejarah adalah gagasan peran berasal dari kelompok yang mempunyai hubungan erat dengan jenis teater atau drama kuno pada jaman dahulu. Karakter yang diperankan oleh seorang aktor dalam lakon tertentu tersebutlah yang disebut dengan peran. Peran Instansi dalam pembangunan nasional yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan.

Teori Peran Organisasi

Menurut Aromatica, D dan Sudrajat, AR (2021) teori peran organisasi merupakan suatu konsepsi atau pandangan, tinjauan, atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Peran organisasi yang disoroti berupa:

1. **Pembagian Kerja.** Pembagian kerja merupakan kegiatan mengurai pekerjaan dalam satuan tugas yang terspesialisasi sehingga setiap orang anggota organisasi mengerjakan dan juga bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang diberikan kepadanya. Tujuan dari pembagian kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mengerjakan tugas yang sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan kapasitas mereka
2. **Departemensi.** Departemensi merupakan proses pengelompokan pekerjaan kedalam unit-unit kerja secara logis yang berkaitan untuk melaksanakan beberapa tugas organisasi mengacu pada pembagian organisasi ke dalam unit-unit atau departemen-departemen yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan tugas spesifik. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi.
3. **Distribusi Otoritas.** Delegasi otoritas yang meliputi otoritas lini, otoritas fungsional, dan otoritas staff. Mengacu pada pembagian organisasi ke dalam unit-unit atau departemen-departemen yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan tugas spesifik. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pembagian otoritas ini memastikan bahwa setiap aspek ditangani oleh individu yang memiliki keahlian dan otoritas yang sesuai, sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
4. **Koordinasi.** Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan individual dan unit-unit kedalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan yang sama baik koordinasi internal maupun eksternal.

Konsep Organisasi

Bentuk-bentuk organisasi berdasarkan wewenang nya adalah sebagai berikut:

1. **Organisasi Lini.** Tipe organisasi ini berjalan secara langsung dari atasan ke bawahan, organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Ciri-ciri organisasi lini adalah:
 - a. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang.
 - b. Jumlah karyawan yang masih tergolong sedikit, sehingga struktur organisasi masih sederhana.
 - c. Tingkat spesialisasi masih belum tinggi.
 - d. Organisasi masih tergolong kecil.

2. Organisasi Lini dan Staff. Organisasi tipe ini asas komando tetap dipertahankan, pelimpahan wewenang juga dilakukan secara vertical dan sepenuhnya pimpinan tertinggi dibantu oleh staff, dimana tugas para staff hanya memberikan bantuan dan juga masukkan kepada pemimpin sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan ataupun keputusan. Ciri-ciri organisasi ini adalah:
 - a. Organisasinya besar dan bersifat kompleks.
 - b. Jumlah karyawan yang banyak.
 - c. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung.
 - d. Terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan staff.
3. Organisasi Fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi suatu tugas tertentu saja. Para bawahan akan mendapat perintah dari beberapa atasan yang masing masing menguasai suatu keahlian tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada bidang masing-masing. Ciri-ciri organisasi ini adalah:
 - a. Pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan.
 - b. Bawahan akan menerima beberapa perintah dari atasan.

Koordinasi antar karyawan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama biasanya mudah karena masing-masing sudah memiliki pengertian yang mendalam mengenai bidangnya.

Konsep Rehabilitasi

Menurut Subagyo Partodiharjo, Rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan mental dan tubuh seseorang yang telah terbukti menjadi pecandu narkoba dan telah menjalani program penyembuhan, tujuannya adalah bahwa pecandu narkoba tidak lagi menggunakan dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik. Bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dijelaskan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
2. Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi.

Rehabilitasi memiliki dua jenis dalam proses penyembuhan yaitu Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

terpadu, fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang mempelajari mengenai masalah dalam masyarakat. Dalam penelitian ini nantinya juga akan memberikan suatu gambaran yang nyata mengenai bagaimana keadaan dari lapangan yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini nantinya keamahiran pebeliti saat melakukan observasi dan juga wawancara sangat dibutuhkan untuk memperoleh data secara maksimal.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Jalan Air Bersih Ujung No 53, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau, 28826.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informan maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dimana metode ini informannya akan dipilih karena memiliki sebuah informasi yang akan berkaitan dengan penelitian (Sugiyono,2018).

Maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala BNNK Dumai.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi.
3. Staff Bidang Rehabilitasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Dalam Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Dumai memiliki tugas penting dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang efektif. Maka dari itu peran BNNK Dumai mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi, pelaksanaan program rehabilitasi serta pembinaan dan juga pendampingan bagi para pengguna yang sedang melakukan proses pemulihan. Dalam bab ini maka penulis akan menguraikan secara rinci peran dari Bdn Narkotika Nasional Kota Dumai dalam Proses Rehabilitasi. Adapun indikator peran organisasi adalah sebagai berikut:

Pembagian Kerja

Dari Pembagian kerja dalam Badan Narkotika Nasional Kota Dumai diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK. Dimana dalam pembagian kerja BNNK Dumai tersebut dibentuk berdasarkan visi misi serta tujuan dari BNNK Dumai. Tujuan dari BNNK Dumai yaitu melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba maka tugas tersebut diambil alih oleh staf sie rehabilitasi, dalam memberikan pelayanan kepada para pecandu korban narkotikamaka diambil alih oleh dokter klinik dan juga psikolog, kemudian untuk pengawasan kepada para pasien korban narkoba maka diberikan kepada perawat, selanjutnya untuk pelaksanaan monitoring kepada para agen maka dilakukan langsung oleh

Kepala sie rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di bidang penanganan narkotika maka dilakukan langsung oleh kepala BNNK Dumai dan juga kepala sie rehabilitasi. Dari hasil wawancara penulis dengan kepala bidang rehabilitasi maka penulis menyimpulkan bahwa dalam bidang rehabilitasi setiap tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian dari masing-masing individu tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar setiap aspek rehabilitasi yang dilakukan mulai dari tahap pengecekan dan juga pemberian rehabilitasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat memberikan efek pemulihan yang baik kepada para korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pembagian kerja ini Badan Narkotika Nasional Kota Dumai selaku lembaga pemerintah non kementerian mengikuti prinsip-prinsip yang serupa dengan pembagian kerja dalam kementerian. Lembaga ini dibuat untuk menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini BNNK Dumai dibentuk berdasarkan fungsinya dan juga tugasnya dalam hal pemberantasan narkotika.

Departemenisasi

Dalam Badan Narkotika Nasional Kota Dumai memiliki departementasi yang cukup jelas dimana setiap unit terdapat dalam BNNK Dumai. Departementasi juga diperlukan untuk beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan visi dan juga misi dalam pemberantasan narkoba. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi terkait dengan adanya departementasi di BNNK Dumai meliputi:

- Plt Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Dumai
- Kasubag Tata Usaha
- Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
- Bidang pemberantasan
- Bidang rehabilitasi.

Adapun minimnya informasi yang didapatkan para pelaku penyalahgunaan narkotika terkait dengan rehabilitasi dikarenakan kurang efektifnya bidang pencegahan dalam proses sosialisasi kepada para masyarakat yang ada di wilayah kerja BNNK Dumai. Kesadaran yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan narkoba juga masih rendah dikarenakan mereka kurang mengetahui apa itu rehabilitasi dan apasaja dampak dari rehabilitasi yang diberikan kepada para pecandu narkotikan. Mereka enggan untuk datang ke kantor dan juga pusat rehabilitasi karena mereka menganggap dirinya sebagai aib karena telah memakai barang terlarang tersebut. Unit unit tersebut memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan juga maksimal guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Distribusi Otoritas

Dari hasil wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BNNK Dumai memiliki distribusi otoritas lini dan juga fungsional yang jelas mulai dari kepala BNNK hingga unit-unit atau bidang yang ada di dalamnya.

- Kepala BNNK Dumai memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi tersebut dan juga memiliki tugas untuk memantau dan juga memberikan sebuah arahan kepada bagian yang ada di kantor BNNK Dumai, memberikan persetujuan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap bidang dengan menandatangani surat perintah untuk melakukan kegiatan dan bertanggung jawab kepada kepala BNNP Riau.
- Kasubag Tata Usaha memiliki otoritas di bawah dan juga bertanggung jawab kepada kepala BNNK Dumai, dan memiliki tugas untuk membantu melaksanakan tugas bagian tata usaha

seperti melaksanakan kegiatan dalam bidang tata usaha dan menyimpan serta menyusun rencana anggaran.

- Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat(P2M) otoritas ini bertanggung jawab dan berada di bawah wewenang kepada kepala Penyuluh Narkoba Ahli Pertama (PNAP), tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan narkoba di berbagai daerah wilayah kerja BNNK Dumai.
- Bidang Pemberantasan, otoritas ini berada di bawah kepala BNNK yang memiliki otoritas guna mengawasi operasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tugasnya adalah menjadi saksi atas barang bukti pemakaian atau peredaran gelap narkoba, dan juga melaksanakan operasi penindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
- Bidang Rehabilitasi, otoritas yaitu bertanggung jawab atas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Tugasnya yaitu merancang dan juga mengawasi program rehabilitasi, mengelola pusat rehabilitasi, dan menyediakan layanan rehabilitasi.

Distribusi otoritas staff melibatkan tanggung jawab dan juga tugas serta wewenang kepada staff yang berperan dalam mendukung fungsi utama dari suatu organisasi hal ini bertujuan agar tugas administrative dan juga operasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- Staff administrasi umum, otoritas yaitu mendukung semua kegiatan administrasi umum, tugasnya yaitu mengelola surat menyurat, pengarsipan dokumen, dan administrasi lainnya.
- Staff keuangan, otoritas yaitu mendukung semua kegiatan keuangan, tugasnya yaitu pembukuan.
- Staff penyuluhan, otoritas melaksanakan tugas penyuluhan di bawah arahan kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Staff pemberantasan, otoritas mendukung operasi penegak hukum di bawah arahan kepala seksi pemberantasan, tugasnya yaitu melaksanakan operasi di lapangan dan juga pelaporan hasil operasi.
- Staff rehabilitasi, otoritas mendukung layanan rehabilitasi di bawah kepala bidang rehabilitasi, tugasnya adalah melaksanakan sesi terapi, konseling, dan juga memantau perkembangan pasien.
- Psikolog dan konselor, otoritas memberikan layanan konseling dan juga terapi kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba, tugasnya melakukan sesi konseling, memberikan terapi, dan juga memantau kemajuan dari pasien.

Distribusi otoritas staff ini memastikan bahwa setiap individu memiliki peran yang jelas dan juga dapat bertanggung jawab. Minimnya informasi terkait dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Dumai di klinik Pratama adalah kurang efektifnya bidang pencegahan dan bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada generasi muda dan juga orang tua yang ada di lingkungan kerja BNNK Dumai sehingga para pelaku tidak mengetahui adanya layanan rehabilitasi yang diberikan kepada para pecandu narkotika. Distribusi otoritas lini, fungsional dan staff ini membantu BNNK Dumai dalam beroperasi secara efektif dengan setiap unit berfokus pada tugas yang lebih spesifik namun mereka juga tetap berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Koordinasi

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai koordinasi yang dilakukan di BNNK Dumai yaitu:

- Koordinasi internal, berupa rapat koordinasi rehabilitasi yang dilakukan secara berkala dengan kepala bidang rehabilitasi dengan kepala seksi yang bertujuan untuk membahas

mengenai perkembangan program, mengevaluasi kinerja, dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi, dan juga komunikasi antar departemen untuk memastikan aliran informasi yang lancar antara bidang rehabilitasi dengan bidang yang lainnya terutama bidang pencegahan dan juga pemberantasan. Dalam penggunaan system informasi secara berkala dan berkelanjutan dapat memberikan efektivitas terkait dengan laporan kegiatan rehabilitasi.

- Koordinasi dengan lembaga kesehatan dengan pengelolaan pusat rehabilitasi dengan menyediakan fasilitas yang memenuhi standard. Selain itu BNNK Dumai juga menjalin kolaborasi untuk memastikan semua aspek rehabilitasi mulai dari assessment awal hingga akhir dilakukan dengan baik.
- Koordinasi dengan keluarga pasien, dengan memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada keluarga terkait dengan rehabilitasi.
- Koordinasi dengan institusi pendidikan, guna meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan juga pentingnya rehabilitasi dengan kegiatan berupa penyuluhan.
- Koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Koordinasi rehabilitasi yang baik ini akan memastikan bahwa seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan lancar serta terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal dan juga efektif bagi penyalahgunaan narkoba. Koordinasi dalam BNNK Dumai juga memiliki sifat koordinasi yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan juga pencapaian dari rehabilitasi itu sendiri. Adapun sifat koordinasinya yaitu:
- Terstruktur. Koordinasi yang dilakukan dijalankan dengan struktur yang jelas dengan adanya pembagian kerja ataupun pembagian tugas serta tanggung jawab yang telah dibuat. Misalnya dalam setiap kepala seksi melapor kepala bidang rehabilitasi tentang perkembangan dari rehabilitasi tersebut.
- Kolaboratif. Kolaboratif ataupun bentuk dari kerjasama yang erat dan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dapat mempengaruhi rehabilitasi itu sendiri. Seperti kerjasama dengan rumah sakit ataupun instansi lain untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih komprehensif.
- Komunikatif. Komunikasi yang dilakukan dengan berbagai pihak dan juga keterbukaan informasi mengenai keberlangsungan dari rehabilitasi sangat berpengaruh untuk kemajuan dan juga keberhasilan dari rehabilitasi ini. Seperti rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan dan juga laporan berkala yang diberikan serta system informasi yang digunakan dalam penyampaian terkait dengan kemajuan dan hambatan rehabilitasi.
- Transparan. Transparansi yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi terkait proses dan juga pengambilan keputusan dalam rehabilitasi sehingga dapat memberikan informasi secara jelas mengenai rehabilitasi yang dilakukan.
- Akuntabel. Setiap unit dan juga individu selalu bertanggung jawab dalam kepada setiap tugas yang telah diberikan dan juga hasil pekerjaan yang telah mereka kerjakan dalam rehabilitasi. Seperti menyusun laporan kinerja dan juga adanya evaluasi berkala untuk memastikan akuntabilitas.

Faktor Penghambat yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Dalam Merehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Jarak Tempuh Perjalanan

Bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba yang enggan untuk melakukan rehabilitasi dikarenakan jarak tempuh yang akan dilalui ke pusat rehabilitasi cukup jauh sehingga banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang tidak ingin melakukan rehabilitasi. Para pelaku penyalahgunaan narkoba juga tidak diberikan transportasi untuk menempuh perjalanan ke

pusat rehabilitasi, mereka hanya mengandalkan kendaraan pribadi yang dimiliki. Banyak korban pelaku penyalahgunaan yang berasal dari luar kota Dumai yang enggan melakukan rehabilitasi di klinik rehabilitasi pratama kota Dumai karena mereka tidak memiliki kendaraan pribadi dan juga biaya untuk menempuh klinik rehabilitasi. Faktor penghambat dari jarak yang jauh memang menjadi salah satu hambatan melakukan rehabilitasi bagi para korban pecandu narkoba, para pecandu narkoba yang sebagian besar memiliki jarak rumah yang cukup jauh dari pusat rehabilitasi, sebagian besar para peserta rehabilitasi mereka yang asalnya dari keluarga menengah ke bawah merasa cukup kesulitan untuk menjalani Rehabilitasi dikarenakan jarak yang cukup jauh dan tentu akan menambah beban biaya perjalanan mereka menuju pusat Rehabilitasi. Keterbatasan dana pada klinik pusat Rehabilitasi Narkoba kota Dumai tidak memungkinkan untuk memberikan subsidi biaya transport para klien yang akan melakukan rehabilitasi, sebab dana yang ada tentu untuk menutupi banyak biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pengobatan di Klinik Rehabilitasi.

Fasilitas yang Kurang Memadai

Ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai untuk melakukan rehabilitasi secara maksimal menjadi kendala serius bagi pihak Badan Narkotika Nasional khususnya di Klinik Pratama, dimana Klinik Pratama hanya tersedia layanan rawat jalan bagi para pelaku penyalahgunaan Narkoba hal ini dikarenakan ruang tidur dan ruangan lainnya yang dibutuhkan untuk proses Rehabilitasi rawat inap masih belum tersedia, walaupun ruangan ada tetapi belum dilengkapi alat kesehatan yang memadai untuk menunjang proses Rehabilitasi Narkoba secara maksimal. Bagi para pasien yang akan melakukan proses Rehabilitasi juga tidak disediakan banyak tempat tidur, sehingga proses Rehabilitasi terkadang membutuhkan waktu yang lama bagi beberapa pasien, padahal mengingat beberapa pasien tersebut memiliki jarak rumah yang cukup jauh ke klinik Pratama sehingga hal inilah yang menjadi sebab pelayanan tersebut belum begitu baik dilakukan karena pasien yang harus menunggu lama disebabkan fasilitas yang belum mendukung. Adapun beberapa fasilitas yang harus disediakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Dumai dan Klinik Pratama untuk menunjang proses Rehabilitasi diantaranya 1) fasilitas medis, untuk menunjang para tenaga medis menangani para pasien kecanduan Narkoba fasilitas medis diantaranya tenaga kesehatan yang ahli dan alat medis yang dibutuhkan ketika melakukan tindakan medis dan tindakan Rehabilitasi kepada para pasien. 2) Ruang Terapi bagi Pasien, ruang terapi dibutuhkan untuk melakukan terapi kepada para pasien yang kecanduan Narkoba, ruang terapi ini juga untuk melakukan tindakan rehabilitasi yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya fasilitas yang tersedia dalam proses rehabilitasi mengakibatkan kurang optimalnya rehabilitasi yang diberikan. Sehingga para pelaku hanya dapat melakukan rawat jalan dan juga kuantitas fasilitas rehabilitasi juga perlu ditingkatkan untuk menyebabkan kekambuhan. Dengan keterbatasan dan juga kurangnya tempat rehabilitasi yang jauh dari tempat tinggal terutama daerah terpencil menjadi sebuah masalah besar. Penyebaran pusat rehabilitasi yang tidak merata sangat berdampak buruk untuk proses layanan rehabilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai sudah cukup berperan mengingat ada 4 indikator yang ditetapkan yaitu pembagian kerja, departementasi, distribusi otoritas dan juga koordinasi. Peran yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut

sudah cukup baik namun dalam aspek koordinasi bidang pencegahan masih kurang maksimal karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan terkait dengan adanya rehabilitasi dan juga pada bidang rehabilitasi juga masih belum efektif karena kurangnya fasilitas yang diperlukan untuk rehabilitasi.

2. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai adalah jarak tempuh yang cukup jauh untuk datang ke pusat rehabilitasi dan juga minimnya transportasi yang dimiliki oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba dan fasilitas yang dimiliki oleh klinik pratama juga kurang memadai sehingga klinik ini hanya menjalankan rehabilitasi rawat jalan untuk para pasien yang akan melakukan rehabilitasi.

Saran

Peneliti memberi saran yang jika dianggap perlu untuk dijadikan bahan masukan untuk peran Badan Narkotika Nasional Kota Dumai Dalam Proses Rehabilitasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan 4 indikator tentang peran organisasi maka sebaiknya pihak Badan Narkotika Nasional Kota Dumai hendaknya lebih menekankan koordinasi antar bidang terutama bidang pencegahan dan juga rehabilitasi sehingga dapat berfokus untuk melakukan penyuluhan kepada para masyarakat tentang bahaya narkoba dan juga pentingnya rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba terkait pada bidang pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat (P2M) guna memberi edukasi dan juga membuka wawasan terkait dengan bahaya narkoba, dan untuk fasilitas hendaknya BNNK Dumai lebih melakukan koordinasi terhadap bagian kasubag tata usaha (bendahara) dalam pelaporan terkait fasilitas rehabilitasi.
2. Pada faktor penghambat terkait dengan jarak tempuh yang lumayan jauh untuk datang ke pusat rehabilitasi hendaknya pemerintah dan juga BNNK Dumai bekerjasama dalam hal penyediaan jasa layanan transportasi untuk para korban dan juga pasien yang ingin melakukan rehabilitasi di klinik pratama BNNK Dumai, dan untuk fasilitas yang kurang memadai hendaknya pemerintah memberikan fasilitas pendukung guna keefektifan rehabilitasi bagi para pasien dan juga para pelaku penyalahgunaan narkoba agar dapat direhabilitasi dan proses pemulihan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N. (2022). Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Program Pencegahan Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. 2-5.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aromatica, D. d. (2021). In *Teori Organisasi* (p. 148). Jawa Tengah: CV Amerta Media
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007
- Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, 2009, hal.15
- Badan Narkotika Nasional. (2014). *Perkaban 11/2014*. 844.
- BNN, H. (2019, Desember 18). *Dumai Masih Rawan, BNN Kota Dumai Kerja Keras*. Retrieved agustus 17, 2023
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Dilliana, R. A. (2016). Peran Konseling Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pemuda Korban Narkoba Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi (Studi pada Panti Sosial Pamardi Putra, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 334.

- E, W. M. (2020). In Pengantar Manajemen (p. 233). Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. Organisasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan, 1–90.
- Frank, I. J. (2008). Community Development. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hadiman, Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm 48
- Heru Winarko. (2018). Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–29.
- Husni. (2016). Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Warta*, 224, 1–16
- J, W. (2003). In Teori Organisasi dan Pengorganisasian (p. 358). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jauwhari, A. J., Pusita, D. A., & Fitriyah, F. (2022). Pengembangan Organisasi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. *Cermin: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 2(1), 16–22. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/CERMIN>
- Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Umm Press, Malang, 2009, Hlm 3
- Muhyadi. (2012). In Dinamika Organisasi Konsep Dan Aplikasinya Dalam Interaksi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nasional, B. N. (2022). In Pusat Penelitaian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2022 Indonesian Drug Report 2022. Jakarta.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2009). Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan*, 3(3), 241–247.
- Priyono. (2017). In Pengantar Manajemen (p. 140). Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Purba, J. C. (2017). Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Mewujudkan Informasi Yang Beretika Dan Bertanggung Jawab Di Provinsi Riau. *Jom Fisip*, 4(2), 1–12.
- Rinayanti, R. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1), 92–107. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.352>
- Sariani, D. S. R. S. I. G. (2022). Pengelompokan Data Pengguna Narkoba Yang Melakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan Menggunakan Metode Clustering. *Informasi Dan Informatika*, 11, 8–13.
- Sartika Dewi, Deny Guntara, & Dicky Indrawan. (2021). Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4Gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekurs. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–23. <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i2.1915>
- Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361–365. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>
- Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta, 2006, hal.105
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 243–248. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>
- Sugiyanto, S. (2015). Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosio Informa*, 1(3), 261–277.

- Suhardono, 2007 Teori Peran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 4
- Sumitro, S. (2019). Keuntungan Dan Kelemahan Dari Setiap Jenis Struktur Organisasi. *Jurnal Informatika*, 2(2). <https://doi.org/10.36987/informatika.v2i2.198>
- Supartha Wayan Geda, S. D. (2017). In Pengantar Perilaku Organisasi (p. 181). Denpasar Timur: CV Setia Bakti.
- Widiana, M. E. (2020). Pengantar Manajemen.
- Supartha, W. gede, & Sintaasih, D. K. (2017). Pengantar perilaku Organisasi; Teori, kasus dan Aplikasi penelitian. In Universitas Udayana
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103.
- Wirayuda, H., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, M. M. (2022). Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 252–258.
- Zuhri, A. F., Ahmad, A., Parlina, I., & Dewi, R. (2020). Sistem Informasi Data Rehabilitasi Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 255–260.